

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Studi pokok dalam Ilmu Hubungan Internasional yang menarik untuk di kaji adalah dunia Arab. Kedaulatan di negara Arab mengalami banyak pergeseran setelah satu dari dua negara *super power* mengalami kehancuran dalam hal ini Uni Soviet. Hancurnya Uni Soviet semakin membuat negara *super power*nya satunya semakin lebih berkuasa yaitu Amerika Serikat yang dibantu oleh sekutu-sekutunya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama di negara Timur Tengah semakin menjadi-jadi dengan berbagai alasan, terutama bahwa negara Timur Tengah merupakan sarang teroris di dunia. Banyak negara di kawasan Timur Tengah mengalami kehancuran baik dari sisi wilayah maupun sisi kedaulatan negara, salah satunya yang baru saja mengalami kehancuran baik dari segi pemerintahan maupun kepemimpinan adalah negara Irak.

Berakhirnya atau pergantian suatu pemerintahan di Irak menimbulkan pergantian pemerintahan yang baru. Sebelum terbentuknya pemerintahan yang baru maka hal pasti ada proses dan kendala yang tentu saja akan menghambat terbentuknya pemerintahan yang baru. Untuk terbentuknya pemerintahan yang baru tersebut sebagai perwujudannya biasanya diadakan apa yang dinamakan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu wadah bagi partai-partai

yang telah selesai elet pemilihan dan segera untuk pergantian pemerintahan

Jadi, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai alternatif terbaik untuk menentukan figure pemerintahan suatu negara.

Pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat Irak merupakan suatu hari yang bersejarah, karena merupakan pemilihan umum yang dilakukan pertama kali setelah dua tahun jatuhnya rezim Saddam Hussein. Oleh karena itu Pemilu saat ini merupakan sebuah tugas suci yang harus dijalankan demi membangun bangsa dan negara yang telah porak poranda akibat pendudukan Amerika.

Implikasi atas proses pembentukan pemerintahan baru di Irak pasca Invasi Amerika Serikat menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan di antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi. Di Irak umat Syiah merupakan kelompok mayoritas, atau sekitar 65 persen dari 24 juta penduduk Irak. Komposisi etnis agama di Irak adalah : 53 persen Arab Syiah, 21 persen Arab Sunni, 14 persen Kurdi Sunni, 5 persen Arab non Muslim, dan 6 persen non Arab non muslim. Namun mayoritas kepemimpinan politik diduduki oleh orang-orang Sunni. Sehingga ada tiga alasan untuk menjawab pertanyaan mengapa memilih judul **"Kendala Pembentukan Pemerintahan Baru Irak Pasca Invasi Amerika Serikat"**.

Pertama, urusan-urusan Irak masih didominasi oleh kebijakan Amerika yang akan melakukan segala cara kapan saja punya niatan untuk menahan diangkatnya ratifikasi itu sampai pada tahapan eksekutif, tanpa lagi peduli pada apapun dan siapapun. Kenyataan pahit ini secara tegas pernah dipaksakan Amerika atas Irak dalam kasus deportasi kelompok teroris Mujahidin Khalq. Lewat sebuah konvensi yang disahkan IGC (Dewan Pemerintahan Interim Irak),

kelompok itu harus hengkang dari Irak sebelum memasuki tahun 2004. Namun, sampai dua bulan terakhir ini mereka masih saja merayap di kota-kota. Bahkan, menurut kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan bersama Amerika, mereka akan menetap di Irak tanpa perlu kuatir terhadap tekanan IGC. Kasus deportasi ini menunjukkan betapa ketetapan dan konvensi yang disahkan IGC miskin jaminan eksekusinya selama bersimpangan dengan keinginan Amerika. Dan secara lebih keras lagi tentunya, Amerika akan menentang penerapan dan dominasi (hukum-hukum) Islam di Irak. Pada hari-hari ini, IGC sedang dan akan selalu menghadapi tekanan luar yang cukup berat.

Kedua, anggota-anggota IGC tidak begitu mampu membina konsistensi, solidaritas dan keharmonisan di antara mereka. Tidak sedikit perselisihan dan tarik ulur kepentingan politis yang alot di dalam IGC. Belum lagi sejumlah anggota yang mengusahakan kepentingan Amerika. Semua itu menjadi faktor-faktor yang siap mencairkan resistensi IGC di hadapan penentangan Amerika terhadap ratifikasi yakni Dewan Pemerintahan Irak ini akan menanggung tekanan dari dua arah; dalam dan luar sekaligus.

Ketiga, rakyat Irak punya tuntutan-tuntutan yang menggantung kepentingan-kepentingan mereka di negara terkaya minyak kedua di dunia itu. Penerapan Islam dan penyusunan UUD Irak di atas hukum-hukum Islam merupakan dua tuntutan utama rakyat yang paling mendesak, sekaligus paling keras menabrak target-target yang dikejar Amerika di negara itu dan kawasan. Bagi pemerintah Bush, kepentingannya adalah prinsip "demokrasi"-nya yang

IGC sejalan dengan rakyat dalam menerapkan ratifikasi itu, Amerika tidak akan segan-segan menjegal itikad nasional tersebut dan melancarkan penolakannya terhadap islamisasi UUD yang akan datang, bahkan sampai mengambil cara-cara kekerasan seperlu mungkin.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah

1. Mengetahui dan menjelaskan secara empiris kendala-kendala dalam proses pembentukan pemerintahan baru Irak pasca invasi Amerika Serikat
2. Menambah pemahaman tentang temuan akademis Politik Dalam Negeri Irak yang terjadi perubahan semenjak Invasi Amerika Serikat 2003
3. Untuk mengaplikasikan Ilmu dan Teori-teori yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang diambil, serta posisi dalam studi Hubungan internasional.
4. Sumbangan terhadap studi dan praktek Hubungan Internasional terutama dunia Timur Tengah pada umumnya.

C. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan negara Irak sekarang ini sedang mengalami guncangan yang sangat hebat sejak invasi Amerika Serikat yang telah menghancurkan negara Irak. Kedaulatan Irak hancur bersamaan dengan hancurnya pemerintahan Saddam Hussein. Untuk menjadi negara yang berdaulat kembali diperlukan adanya suatu konstitusi, namun hal ini tidak mudah yang diperkirakan banyak kalangan

Proses pembentukan pemerintahan baru di Irak memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan negara Irak sendiri selain telah hancur akibat invasi Amerika Serikat dengan sekutunya juga adanya pertentangan dari dalam rakyat Irak sendiri⁶. Selain itu terdapat tiga kekuatan yang sedang bersaing untuk merebut posisi politik tertinggi, yakni kekuatan Syiah, Sunni, dan Kurdi. Kekuatan kelompok Syiah berada di bawah payung Aliansi Irak Bersatu pimpinan Ayotollah Ali Hussein al-Sistani. Koalisi tersebut terdiri dari 288 kandidat yang berasal dari 22 partai atau kelompok politik.

Golongan mayoritas Syiah yang terpinggirkan secara politik yang cukup lama akhirnya dapat meraih kekuasaan. Hasil perhitungan akhir suara pemilu memperlihatkan Aliansi Irak Bersatu, yang merupakan wadah politik utama golongan Syiah, meraih suara tertinggi, 4,075 juta suara (48%) dari total 8,5 juta pemilih. Sementara Kurdi merebut 2,175 suara (26%). Sedangkan Sunni hanya mendapat sekitar 1,5 juta suara.⁷

Di Irak umat Syiah merupakan kelompok mayoritas, atau sekitar 65 persen dari 24 juta penduduk Irak. Ada kenaikan komposisi bila dibandingkan pada awal kemerdekaan dimana komposisi etnis agama di Irak adalah : 53 persen Arab Syiah, 21 persen Arab Sunni, 14 persen Kurdi Sunni, 5 persen Arab non Muslim, dan 6 persen non Arab non muslim. Namun mayoritas kepemimpinan

⁶ Wawancara Presiden (sementara) Irak, saat wawancara dengan harian Asharq al-Awsat yang berpusat di London, 12 Desember 2003

⁷ www.kompas.com, Senin, 14 Februari 2005

politik diduduki oleh orang-orang Sunni. Dan kaum Syiah tidak mempunyai tepat untuk menduduki jabatan-jabatan politik.⁸

Dalam pemilu kali ini merupakan kesempatan bagi kelompok Syiah sebagai peluang historis yang akan membawa mereka ke tumpuk kekuasaan setelah delapan dekade sejak merdeka dari Inggris tahun 1932 di bawah dominasi Sunni, sekitar 20 persen dari total 24 juta jiwa penduduk. Kejatuhan rezim Ba'ath pimpinan Saddam Hussein pada bulan April 2003 telah mengakhiri dominasi politik Arab Sunni dan nyaris mustahil untuk kembali berkuasa.

Jumlah mayoritas Syiah di negara ini lebih dari 65 persen dari jumlah penduduk Irak yang lebih dari 24 juta orang. Negara ini merupakan pusat terpenting mazhab Syiah yang merupakan salah satu mazhab utama dalam Islam. Imam Ali as yang merupakan Imam pertama Syiah menetapkan pusat pemerintahannya di Kufah salah satu kota di Irak.

Di sepanjang tahun-tahun yang lama, terbentuk gerakan politik, sosial dan budaya Syiah di Irak. Di Irak, Houzeh Ilmiah Najaf dengan sejarah seribu tahun merupakan pusat penting munculnya pemikiran mazhab Ahlul Bait Rasulullah dan para Imam Syiah di berbagai kota Irak yang menyebabkan negara ini memiliki posisi penting.⁹

Era paling sulit untuk orang-orang Syiah Irak ialah pada zaman pemerintahan partai Baath yang telah mencapai kekuasaan selepas kudeta tahun

⁸ Samh Al-Khalil, *Republic of Fear*, Huthingson radius. 1990, dikutip dan ini Riza Sihbudi, Ini Hamban Basyar, dan Happy Bone Zulkarnen, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. (Bandung: Ereto, 1933). hal 100

⁹ Maryadi, *Telaah Kritis tentang Keadilan Para Sahabat dan Referensi Politik dalam Islam*, Surakarta, 2002, hal. 273

1968. Pada zaman ini, beberapa organisasi baru Syiah telah dibentuk untuk mempertahankan hak-hak kaum Syiah. Para ulama pun menentang keras ekstrimisme partai Ba'ath dan politik penumpasan mereka. Oleh sebab itu Saddam Husein telah melakukan penumpasan terhadap orang-orang Syiah terutama para ulama dan ruhaniawan mereka. Begitu Saddam Husein mencapai kekuasaan pada tahun 1979 dan setelah posisinya semakin kokoh di Irak, dia telah melakukan tekanan keras terhadap orang-orang Syiah.

Selama berkuasa Saddam telah menggelar perang terhadap dua tetangganya yaitu Iran dan Kuwait menyebabkan kerugian jiwa dan harta yang besar ke atas kedua negara tersebut dan demikian juga kepada Irak sendiri. Di akhir perang sekutu di bawah pimpinan Amerika terhadap Irak pada tahun 1991, orang-orang Syiah telah bangkit dengan gerakan besar bersama-sama orang-orang Kurdi untuk menumbangkan Saddam dan menyelamatkan diri dari diktator yang haus darah ini. Tetapi orang-orang Amerika telah menarik tentara mereka sehingga tentara penjaga Saddam mampu menumpas kebangkitan ini. Dengan demikian, walaupun pada awal kebangkitan orang-orang Syiah dan kurdi telah mencapai kesuksesan tetapi disebabkan oleh pengkhianatan para pejabat Gedung Putih, orang-orang Syiah menghadapi penumpasan dan pembunuhan massal. Realitas pahit ini menyebabkan orang-orang Syiah memahami benar niat jahat Washington dan ketidakikhlasan negara ini dalam mendukung rakyat Irak.¹⁰

Periode antara tahun-tahun 1991 hingga serangan Amerika dan Inggris ke Irak pada tahun 2003, merupakan periode yang penuh dengan kesulitan untuk

kaum Syiah. Karena selain penumpasan besar-besaran yang dilakukan oleh rezim Saddam, mereka juga berhadapan dengan masalah kelaparan dan musibah yang muncul dari embargo ekonomi yang disahkan oleh Dewan Keamanan terhadap rezim Saddam. Tekanan terberat menimpa rakyat, khususnya orang-orang Syiah. Dengan ini masyarakat Syiah Irak terpaksa menanggung hidup penuh penderitaan, terutama selama pemerintahan Saddam yang kejam. Walaupun mereka merupakan 60 persen dari total penduduk negara ini, namun mereka tidak memiliki peran menonjol dalam pemerintahan. Karena semua pos penting berada di tangan Saddam Husein dan anggota keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dipercayai oleh Saddam. Orang-orang Syiah bukan saja tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan rezim Saddam saat itu, sebaliknya mereka senantiasa berhadapan dengan pembunuhan massal yang dilakukan oleh rezim ini.¹¹

Ketika rezim Saddam ditumbangkan oleh serangan AS dan Inggris ke Irak pada bulan April 2003, rakyat negara ini, khususnya kaum Syiah telah terselamatkan dari kejahatan dan kebrutalan rezim ini. Tetapi tumbangannya Saddam dan pemerintahan despotiknya diikuti pula oleh masalah lain yaitu pendudukan Irak oleh Amerika Serikat. Dengan kata lain, rakyat Irak yang selamat dari cengkeraman penguasa diktator, kini terperosok pula ke dalam perangkap penjajah. Memang benar bahwa tentara Amerika Serikat menduduki Irak dengan alasan untuk menegakkan demokrasi di negara ini. Akan tetapi semua

orang tahu bahwa sebenarnya Washington sedang merampok seluruh kekayaan Irak dan menancapkan kekuasaannya lebih kuat lagi di kawasan ini.

Menghadapi kondisi seperti ini, masyarakat Syiah Irak telah mengeluarkan statemen yang jelas dan tegas. Meskipun mereka telah selamat dari pemerintahan tangan besi penguasa diktator yang haus darah, tetapi mereka sama sekali tidak bersedia menerima penjajahan negara mereka. Rakyat dan ulama Syiah sejak awal telah menekankan bahwa Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan imperialis lain harus sesegera mungkin mengakhiri kehadiran mereka di Irak dan menyerahkan urusan negara ini kepada rakyatnya sendiri. Ayatullah Sayid Muhammad Baqir Hakim, seorang tokoh ulama terkenal Syiah, yang hingga akhir hayat beliau menjabat sebagai ketua Dewan Tertinggi Revolusi Islam Irak, pada tanggal 29 Oktober 2003 telah gugur syahid dalam satu peristiwa teror yang sangat tragis. Beliau merupakan seorang yang selalu menegaskan ketidakpercayaan rakyat Irak terhadap Amerika Serikat. Ayatullah Udhma Sayid Ali Sistani, pemimpin agama atau marja' tertinggi di Irak, juga mengkritik keras pendudukan negara ini oleh pihak asing dan meminta pelaksanaan pemilu parlemen di Irak.

Kemudian dua tahun pasca jatuhnya rezim Saddam Husein, rakyat Irak melangsungkan pemilihan umum, Minggu, 30 Januari 2005. Dihari bersejarah itu Pemilu yang demokratis dilaksanakan setelah lama dibawah pemerintahan yang otoriter. Dihari bersejarah itu rakyat Irak memilih 275 anggota Majelis Nasional yang memiliki tugas utama menyetujui konstitusi baru dan memilih presiden dan

Partisipasi rakyat Irak dalam pemilu dan pemilihan para wakilnya dalam mengurus negara merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri kekacauan di negara ini. Tetapi tampaknya ada tangan-tangan tertentu yang tidak ingin rakyat Irak, khususnya kaum Syiah menggunakan kesempatan yang ada untuk pertama kalinya menentukan masa depan negara mereka dalam proses demokrasi. Berbagai aksi peledakan bom, yang menjadikan rakyat sipil sebagai sasaran dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat, dinilai sebagai bagian dari usaha menghalangi rakyat luas untuk ikut memberikan suara mereka dalam pemilu. Demikian juga pihak penjajah dan beberapa kelompok di dalam, serta sejumlah negara regional diketahui berusaha menciptakan perselisihan di kalangan umat Syiah dan Sunni di Irak.

Tidak diragukan lagi bahwa rakyat Irak, khususnya warga Syiah, mencita-citakan masa depan yang cerah. Diantara prioritas penting saat ini untuk rakyat Irak ialah keterbebasan diri dari penjajahan asing seperti Inggris dan Amerika. Bangsa Irak tidak menerima untuk berada dalam cengkeraman dan kekuasaan Amerika Serikat setelah terbebas dari tangan diktator Saddam dan ingin mencapai kemerdekaan sendiri. Oleh sebab itu, sebagai kelompok mayoritas, kaum Syiah Irak menuntut tentara Amerika segera keluar dari tanah air mereka. Jelas sekali bahwa jika pemilu Irak berlangsung dengan jujur dan sehat, yang disusul dengan munculnya pemerintahan yang bersih dan pilihan rakyat di

... dan ...

Bisa dipastikan bahwa tujuan utama Amerika Serikat menyerang Irak ialah untuk menguasai dan merampok sumber minyak negara ini. Satu-satunya cara untuk mencegah tragedi ini ialah dengan menyadarkan rakyat Irak dan mengembalikan hak mereka untuk menentukan nasib serta masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu penting sekali bagi warga Syiah Irak untuk berpartisipasi dalam pemilu yang dinilai sebagai suatu keharusan oleh para ulama dan maraji' Syiah.

Secara keseluruhan kemerdekaan yang sebenarnya bagi sebuah negara ialah ketika rakyat negara tersebut dapat ikut serta secara bebas dan bersatu di kancah politik, dan memiliki independensi serta kebebasan penuh dalam menentukan nasib masa depan mereka sendiri. Oleh sebab itu partisipasi seluruh rakyat Irak dalam pemilu akan sangat membantu dalam mengakhiri pendudukan dan mencapai kemerdekaan.

D. Pokok Permasalahan

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat mengajukan permasalahan yang akan dibahas yaitu : “Kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat pembentukan pemerintahan Irak pasca invasi Amerika Serikat 2003?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar penulisan ini bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep dalam menyusun

hipotesa. Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan di atas, penulis menggunakan teori pemikiran yaitu Teori Demokrasi Konsolidasi.

Teori Demokrasi Konsolidasi

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bias menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.¹² Teori Demokrasi konsolidasi menurut Juan Linz dan Alfred Stepan mengemukakan bahwa tiga kondisi minimal sebelum kita membicarakan Demokrasi Konsolidasi yaitu :¹³

Pertama, didalam pemerintahan yang modern, bebas dan kewenangan pemilu tidak terbatas, pemenang tidak dapat melakukan monopoli kekuasaan dan warga negara tidak dapat dipengaruhi hak mereka dilindungi oleh undang-undang, semua ini terwujud kalau adanya negara. Di beberapa bagian dunia konflik tentang kekuasaan dan daerah kekuasaan dan identitas dan loyalitas dari demokrasi sangat hebat dengan tidak adanya negara. Tanpa negara, tidak ada demokrasi.

Kedua, demokrasi tidak dapat menjadi gagasan sebagai konsolidasi sampai sebuah transisi demokrasi telah membawa kearah penyelesaian. Sebuah kondisi perlu untuk penyelesaian dari sebuah transisi demokrasi adalah berpegang pada kebebasan dan pertandingan pemilu.

Ketiga, tidak ada rejim yang disebut demokrasi kecuali rejim tersebut diatur oleh pemerintah yang demokratis. Jika kebebasan pemilihan eksekutif

¹² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*, PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta, 1998, hal.161

¹³ Menurut Juan J. Linz and Alfred Stepan, "Toward Consolidated Democratis," dalam Takashi Inogaki, Edward Newman dan John Keane (Ed), *The Changing nature of Democracy, the*

(tidak penting berapa besarnya dari mayoritas mereka) melanggar konstitusi, melanggar individu dan minoritas, meligitimasi fungsi dari legislatif dan adanya pelanggaran hukum negara, rejim mereka bukan demokrasi.

Jadi dalam membicarakan demokrasi konsolidasi kita tidak setuju dengan rejim non-demokrasi liberalisasi, atau psudeo demokrasi atau dengan hybrid demokrasi, serta institusi yang berada diluar kontrol dari negara demokrasi. Karena hanya demokrasi yang dapat menjadi Demokrasi Konsolidasi.

Definisi dari Demokrasi Konsolidasi adalah berhubungan dengan *Behaviourally* (tingkah laku)¹⁴, sebuah demokrasi adalah konsolidasi ketika tidak berartinya bangsa, sosial, ekonomi, politik atau aktor institusi mengeluarkan sumber-sumber penting dalam usaha untuk mencapai tujuan mereka, dan mereka tidak peduli dengan adanya pembentukan sebuah non-demokrasi atau melepaskan diri negara.

Attitudinally (sikap), sebuah rejim demokrasi adalah konsolidasi saat mayoritas kuat dari opini publik, tetap berada di tengah-tengah dari problem utama ekonomi dan jauh dari ketidakpuasan terhadap pemegang kekuasaan, mereka memegang kepercayaan bahwa prosedur demokrasi dan institusi adalah jalan yang tepat untuk hidupnya pemerintahan kolektif dan saat dorongan dari alternatif datang dari yang anti terhadap sistem tidak ada (diam) atau lebih kurang terisolasi dari kekuatan pro demokrasi.

Constitutionally (undang-undang), sebuah rejim demokrasi adalah konsolidasi saat kekuatan pemerintah dan non pemerintah menjadi subjek dan

kebiasaan juga, penyelesaian dari konflik dengan batas-batas dari hukum-hukum pokok, prosedur dan persetujuan institusi oleh proses demokrasi baru.

Agar suatu demokrasi menjadi konsolidasi menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan adalah dengan penggabungan antara *Civil Society* dan *Political Society*, yang dimaksud dengan *Civil Society* adalah didalam arena politik dimana organisasi sendiri dan daerah otonomi. Gerakan-gerakan, kepentingan individu untuk artikulasi nilai-nilai dan membentuk asosiasi, dan solidaritas dan untuk kemajuan kepentingan mereka. *Civil society* dapat termasuk bermacam-macam gerakan sosial- kelompok wanita, asosiasi lingkungan, agama dan organisasi intelektual-baik asosiasi dari semua strata sosial, beberapa persatuan dagang, grup pengusaha dan asosiasi profesional. Sedangkan *Political Society*, dimana arena politik aktor politik berkompeten pada hak kekuasaan untuk menjalankan kontrol pada kekuatan masyarakat umum dan aparatur negara, *Civil Society* oleh mereka dapat dikatakan dapat merusak sebuah rejim non-demokrasi tetapi konsolidasi demokrasi (tetap sebuah transisi demokrasi) harus meliputi *political society*.

✓ Demokrasi konsolidasi memerlukan penghargaan pembangunan warga negara untuk bagian institusi dari sebuah demokrasi masyarakat politik- partai politik, legislatif, pemilihan, pimpinan politik dan aliansi antar partai. ✓

F. Hipotesa

Dari kerangka dasar teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Berupa pendahuluan, yang terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metodologi pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Penulis akan membahas tentang keadaan di negara Irak, dan Dinamika Irak sebelum invasi Amerika Serikat.

BAB III : Dalam bab ini penulis ingin mengemukakan indikasi kegagalan pembentukan pemerintahan baru Irak.

BAB IV : Untuk bab ini penulis akan bercerita tentang hambatan pembentukan pemerintahan baru Irak pasca Pemilu.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan yang merangkum semua penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan